

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim yang terjadi di berbagai negara membawa persoalan yang cukup serius bagi sebuah negara, hal ini karena perubahan iklim memiliki dampak buruk pada aspek kehidupan fisik, lingkungan, dan sosial-ekonomi dalam sebuah negara. Perubahan iklim serta dampak buruk yang tersebut mampu merugikan berbagai sektor seperti sektor pertanian, makanan, air, sosial, ekonomi, dan sistem ekologi (Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report, 2007:11). Sebagai sebuah negara, Indonesia dinilai memiliki catatan buruk sebagai aktor global dalam menyumbang perubahan iklim terus terjadi. Salah satu buktinya adalah Indonesia merupakan negara sebagai produsen gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia dengan 60 sampai 85% emisinya berasal dari kerusakan dan degradasi hutan (Eko, 2022, chap 1). Sebagai negara yang memiliki karakteristik negara kepulauan tersebut, perubahan iklim dinilai memiliki risiko tinggi pada daerah pesisir akibat naiknya permukaan air laut. Hal ini diketahui melalui hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) mengenai *Coastal Vulnerability Index* yang menyatakan bahwa nilai potensial ekonomi rentang tahun 2020-2024 yang hilang karena perubahan iklim dari sektor pesisir dan laut mencapai Rp.81,53 Triliun terutama pada pesisir pulau Jawa dan Sulawesi. Adapun data yang menunjukkan bahwa sekitar 23 juta orang di pesisir Indonesia akan menghadapi banjir laut setiap tahunnya pada 2050 akibat peningkatan ketinggian air laut akibat perubahan iklim yang terjadi abad ini (Amindoni, 2020). Melalui fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia

tersebut dapat diartikan bahwa perubahan iklim memiliki dampak buruk bagi masyarakat seperti kerusakan infrastruktur yang terdapat di pesisir, penurunan kualitas lingkungan hidup, hilangnya mata pencaharian masyarakat, konflik sosial berkepanjangan, peningkatan kemiskinan, hingga penggunaan air bersih yang berbayar akibat terbatasnya sumber mata air bersih. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara melalui kebijakannya memiliki tanggung jawab tinggi untuk menangani perubahan iklim yang semakin buruk terjadi di Indonesia.

Tanggung jawab pemerintah dinilai belum cukup berdampak baik bagi perubahan iklim di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dibuktikan dengan telah disahkannya undang-undang Cipta Kerja pada tahun 2023 yang di mana terdapat perubahan proses perizinan investasi berbasis lahan terkait bisnis ekstraktif pada sektor sumber daya alam diganti dengan persetujuan lingkungan yang dinilai lebih 'lemah' dari perizinan usaha dan mampu memperburuk perubahan iklim di Indonesia. Selain itu hal ini dapat menimbulkan konflik baru seperti budaya oligarki, hilangnya hak rakyat (masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), hingga mencederai proses demokrasi di Indonesia (Greenpeace Indonesia, Siaran Pers, 2021). Satu dari sekian banyak kebijakan-kebijakan bermasalah tersebut memberikan sebuah respons dan resistensi dari organisasi gerakan sosial profesional seperti Greenpeace Indonesia. Resistensi dan respons atas kebijakan tersebut diberikan oleh Greenpeace Indonesia dalam berbagai *output*, salah satunya adalah kampanye mengenai keadilan untuk krisis iklim di Indonesia.

Secara lebih luas, Greenpeace Indonesia merupakan sebuah Organisasi Gerakan Sosial atau *social movement organization* dengan tipe Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia sejak tahun 2005 yang berada pada naungan Greenpeace Southeast Asia. Greenpeace Indonesia memiliki fokus kampanye lingkungan hidup dengan visi dan misi yang dijelaskan pada dokumentasi internal Greenpeace Indonesia pada saat induksi sukarelawan bulan Februari 2022 yang bertujuan untuk menjamin kemampuan bumi dalam melestarikan keanekaragaman makhluk hidup, adapun misi Greenpeace Indonesia seperti melindungi hak-hak dari lingkungan hidup di Indonesia, mengekspos dan berupaya menghentikan kejahatan lingkungan di Indonesia, dan mengedepankan pembangunan bersih bagi makhluk hidup di Indonesia. Berkaca pada Greenpeace Southeast Asia sebagai organisasi kontingen di Asia Tenggara, berbagai kampanye sudah dilakukan dan diklaim berhasil oleh Greenpeace Southeast Asia seperti halnya pada tahun 1990 Greenpeace melakukan kampanye untuk mendorong pasal UU Republic No. 8749 atau UU Udara Bersih 1999 di Filipina, lalu pada tahun 2002 Greenpeace berhasil kampanye penolakan makanan dengan teknologi rekayasa genetik di Thailand, hingga pada tahun 2009 Greenpeace Asia Tenggara melakukan tekanan untuk menolak nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk negara Indonesia yang di mana salah satu hasil kampanye nya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia mencabut pembangunan PLTN. Lalu pada tahun 2005, Greenpeace memiliki kantor regional di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah resmi terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dengan kategori perhimpunan Hijau Damai dengan enam pendiri dari akta pendiriannya. Greenpeace Indonesia sendiri konsisten dalam melakukan

kampanye pada 4 program besar bersifat strategis yaitu *Ocean and Plastic*, *Urban People Power*, *Climate*, dan *Forest*.

Berdasarkan program kampanye Greenpeace Indonesia, terdapat isu *climate* yang memiliki artian bahwa keadilan iklim di Indonesia menjadi perhatian lebih lanjut oleh Greenpeace Indonesia hingga berkembang menjadi sebuah program kampanye. Melalui permasalahan iklim di Indonesia tersebut, bentuk kampanye Greenpeace Indonesia bersama dengan jaringan koalisi lainnya mengambil peran dalam aksi unjuk rasa skala global dengan tajuk Global Climate Strike. Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global adalah aksi serentak yang dilakukan pada berbagai kota di dunia dengan mengangkat isu perubahan iklim sejak tahun 2018 yang dipimpin oleh Greta Thunberg di depan gedung parlemen Swedia (BBC, 2022). Di Indonesia sendiri sejak 15 Maret 2019 hingga 26 Maret 2021 terdapat 116 aksi protes krisis iklim di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar, dan Jayapura (Apresian, 2021). Pada tahun 2023, Global Climate Strike di Indonesia diketahui diikuti oleh lebih dari 69 komunitas dari berbagai kota di Indonesia dengan tuntutan kepada pemerintah untuk memprioritaskan krisis iklim di tahun kampanye politik 2023-2024 (Walhi, 2023). Pada aksi Global Climate Strike Indonesia, para partisipan menuntut kepada pemerintah mengenai perlunya sebuah kebijakan publik yang berpihak sepenuhnya pada lingkungan hidup untuk memperbaiki krisis iklim yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu pada Global Climate Strike yang menjadi agenda tahunan, hal tersebut memiliki momentum khusus dalam mencapai tujuan yaitu keadilan untuk krisis iklim di Indonesia. Greenpeace Indonesia beserta koalisi Global Climate Strike 2023 dinilai memiliki tantangan serius dalam

menuntut keadilan krisis iklim di Indonesia, yaitu angka partisipasi yang rendah. Partisipasi gerakan sosial dalam menuntut perlindungan lingkungan di Indonesia dinilai rendah dan masih sulit dalam mempengaruhi kebijakan publik (Apresian, 2021). Data pendukung lainnya menunjukkan bahwa orang Indonesia menjadi urutan pertama di dunia yang tidak percaya *global warming* dengan penekanan bahwa perubahan iklim tidak terjadi, atau perubahan iklim terjadi namun bukan manusia yang harus bertanggung jawab (Kamaliah, 2022).

Selain itu pada ditunjukkan melalui riset kuantitatif oleh Copsey, Dalimunthe, Hoihtink, dan Stoll (2016) terhadap 2.087 responden di Indonesia (Pulau Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan) mengenai pemahaman masyarakat tentang perkembangan isu lingkungan di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat responden dalam berpartisipasi aksi perlindungan lingkungan yang di mana “sebanyak 53% responden menyatakan kurangnya waktu luang dalam mengikuti aksi, 49% responden menyatakan bahwa kurangnya uang dalam modal partisipasi gerakan, 48% responden menyatakan kurangnya pengetahuan yang memadai untuk mengikuti aksi, 46% responden menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sekitar menjadi faktor penghambat, 42% responden menyatakan bahwa pesimis bahwa aksi yang akan dilakukan berdampak untuk perlindungan lingkungan, 39% responden menyatakan bahwa aksi perlindungan lingkungan memiliki risiko tinggi, dan 37% responden menyatakan bahwa tidak tertarik dengan perlindungan lingkungan”(Chapter 2). Melalui fenomena tersebut, Greenpeace Indonesia sebagai organisasi gerakan sosial profesional memiliki strategi dalam merancang kampanye setiap tahunnya pada Global Climate Strike di Indonesia sejak 2019.

Terdapat fenomena menarik pada gerakan Global Climate Strike 2023 di Indonesia yang mencakup organisasi gerakan sosial profesional dan mobilisasi sumber daya.

Diketahui bahwa Karakteristik pada organisasi gerakan profesional mencakup beberapa ciri khas seperti kepemimpinan yang mencurahkan waktu penuh untuk gerakan (sebagian besar sumber daya berasal dari luar kelompok yang dirugikan dan diklaim diwakili oleh gerakan tersebut), lalu basis keanggotaan berskala cukup kecil dan melibatkan sukarelawan, memiliki upaya untuk memberikan citra berbicara untuk konstituen, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan terhadap konstitusi yang sama, dan staf profesional sangat menentukan posisi yang diambil organisasi atas masalah (McCarthy dan Zald dalam Donati 1999, 146). Selain itu dalam konteks mobilisasi sumber daya, terdapat faktor krusial agar sumber daya dapat dimobilisasi secara ideal dan signifikan pada sebuah gerakan sosial. Organisasi Gerakan sosial profesional seperti Greenpeace Indonesia memiliki perhatian penting dalam hal mobilisasi massa sebagai salah satu cara agar tujuan pada Gerakan sosial tercapai. Pasalnya, partisipasi dalam gerakan *Social Movement Organization* (Organisasi Gerakan Sosial) bersifat didorong dan sebagian besar kerja sukarela untuk proyek-proyek tertentu (Porta dan Diani, 2006: 147). Hal tersebut berkaitan dengan mobilisasi sumber daya pada sebuah gerakan sosial yang di mana faktor pendukung gerakan sosial seperti terdapat jaringan seperti koalisi, adanya dukungan dana, adanya tekanan, dan upaya pengorganisasian efektif berlandaskan sebuah ideologi (Arfiana, 2018). Sejatinya organisasi gerakan profesional dinilai akan tampak lebih baik untuk memobilisasi karena mereka memfasilitasi partisipasi massa, inovasi taktis, dan pengambilan

keputusan yang cepat (Morris dalam Porta dan Diani, 1999: 285). Melalui hal di atas, kapasitas organisasi gerakan sosial profesional seperti Greenpeace Indonesia dalam hal mobilisasi sumber daya berupa partisipasi massa, inovasi taktis, dan keputusan program dalam Global Climate Strike 2023 di Indonesia mampu menjelaskan fenomena krisis iklim yang ada di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, terdapat hal menarik yang menjadi konteks pada penelitian ini yaitu bagaimana Greenpeace Indonesia sebagai sebuah Organisasi Gerakan Sosial atau *social movement organization* dapat melakukan mobilisasi sumber daya pada masyarakat mengenai permasalahan krisis iklim di Indonesia yang mencapai status krisis sampai saat penelitian ini ditulis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Dalam pembahasan mengenai gerakan sosial, dibutuhkan pemahaman secara mendalam. Selain itu gerakan sosial juga menjadi perhatian menarik karena sifat gerakan sosial bersifat dinamis berdasarkan isu substansial yang terjadi pada masyarakat. Sehingga melalui pembahasan terkait, peneliti sajikan penelitian

terdahulu pada satu sub bab khusus. Penelitian terdahulu yang terkandung juga memiliki konsep kesamaan dari sisi teori dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya. Adapun perbedaan yang dijelaskan pada 5 (lima) penelitian terdahulu tinjauan pustaka pada sub bab ini. Berikut penjelasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

Penelitian *pertama* dilakukan oleh Arfiana (2018) dalam skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tahun 2018 dengan judul (*Gerakan Mahasiswa Pemuda Tastura (Tatas Tuwu Trasna) dalam Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi di Lombok Tengah*). Pada penelitian tersebut, disimpulkan bahwa hasil penelitian Gema Tastura sebagai gerakan sosial baru berhasil mengatasi permasalahan program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah dengan pendekatan advokasi dan menemukan mobilisasi sumber daya pada gerakan tersebut seperti melakukan pemberdayaan terhadap petani, membantu dalam mengurangi risiko kelangkaan pupuk subsidi ditambah dengan fenomena aksi kolektif terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar lebih cermat dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi (Arfiana, 2018: 125). Program yang dilakukan oleh Gerakan tersebut diketahui dilatar belakangi oleh buruknya sistem distribusi pupuk bersubsidi untuk petani sehingga berdampak tidak baik pada kesejahteraan petani di Lombok Tengah. Adapun kesamaan yang dibahas pada penelitian ini dengan milik penulis dari sisi teori Mobilisasi Sumber daya dan Gerakan Sosial, namun terdapat perbedaan pada unsur subjek penelitian dan ruang lingkup gerakan sosial yang dimuat yaitu Greenpeace Indonesia sebagai organisasi kampanye bukan sepenuhnya advokasi. Sehingga penulis merasa

bahwa terbantu dengan laporan tersebut dalam unsur teori agar dapat memperkaya pandangan peneliti pada penelitian ini.

Pada penelitian *kedua* dilakukan oleh Setiawan, K.B. (2018) dalam skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret tahun 2018 dengan judul <*Strategi Mobilisasi Sumber daya Gerakan Sekolah Menulis Buku Sebagai Gerakan Sosial Baru (studi kasus pada organisasi gerakan menulis buku Indonesia)*>. Pada penelitian tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan beberapa faktor penghambat dalam masalah rendahnya budaya literasi di Surakarta seperti segi internal (pengambilan waktu, kondisi tim yang *upgrading*, manajerial waktu yang buruk, dan faktor eksternal seperti adanya resistensi beberapa pihak masyarakat yang belum menerima Gerakan Menulis Buku Indonesia dengan baik. Sebagai gerakan sosial baru, GSMB memiliki strategi memobilisasi sumber daya moral, kultural, organisasi-sosial, dan material yang positif (Setiawan, 2018). Program yang dilakukan oleh Gerakan tersebut diketahui dilatar belakangi oleh rendahnya budaya minim literasi yang terjadi di kota Surakarta dan berdampak pada aspek pendidikan yang lain. Penelitian ini memiliki kesamaan yang dibahas pada penelitian milik penulis dari sisi pembahasan strategi dari teori Mobilisasi Sumber daya dalam bentuk sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya organisasi sosial, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Namun terdapat perbedaan pada unsur subjek penelitian dan fokus penelitian gerakan sosial yang dimuat yaitu Greenpeace Indonesia dan isu pada gerakan sosial peneliti ini adalah kampanye lingkungan. Dengan hal tersebut, penelitian *kedua* dinilai membantu peneliti dalam menyusun kerangka teori dan penjelasan mendalam mengenai gerakan sosial.

Selanjutnya penelitian *ketiga* dilakukan oleh Nadia, N. (2019) dalam skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019 dengan judul *Mobilisasi Sumber daya dalam Aksi Kamisan*. Pada penelitian tersebut, disimpulkan juga bahwa Ditemukannya strategi mobilisasi tersebut seperti strategi pemanfaatan *public figure*, strategi penggunaan media sosial, strategi pelibatan anak muda, strategi perkembangan isu sebagai sebuah sumber daya (Nadia, 2019). Diketahui juga bahwa alasan yang dilakukan oleh Gerakan tersebut diketahui dilatarbelakangi oleh Tidak puasnya aktor gerakan Kamisan pada upaya pemerintah dalam memberikan keadilan pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi landasan gerakan Kamisan yang sudah 12 tahun bergerak, sehingga menarik bagi peneliti mengetahui strategi mobilisasi partisipan dari faktor penghambat dan pendorong dalam proses mobilisasi gerakan. Adapun kesamaan yang dibahas pada penelitian ini dengan milik penulis dari sisi teori Mobilisasi Sumber daya dan Gerakan Sosial, namun terdapat perbedaan pada unsur subjek penelitian dan isu gerakan sosial yang dimuat yaitu Greenpeace Indonesia sebagai organisasi kampanye lingkungan. Melalui penelitian ketiga tersebut, peneliti merasa terbantu dengan hasil penelitian dan kerangka berpikir sehingga dapat memperkaya pandangan peneliti mengenai gerakan sosial.

Lalu penelitian *keempat* dilakukan oleh Suwarno, J. (2016) dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.3 No.2., Agustus 2016 dengan judul (*Gerakan Muncar Rumahku' dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan*). Pada penelitian tersebut, disimpulkan juga bahwa ditemukannya Strategi Gemuruh dalam memobilisasi para aktor sesuai dengan

kapasitas untuk memenuhi kebutuhan gerakan sosial seperti mengajak partisipan melakukan promosi pada media sosial, pembuatan akun media sosial, membentuk jaringan (Suwarno, 2016: 24). Diketahui juga bahwa urgensi gerakan yang dilakukan oleh Gemuruh tersebut dilatarbelakangi oleh kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengakibatkan nelayan sekitar Kecamatan Muncar, Banyuwangi di rugikan. Lebih dari itu kesamaan yang dibahas pada penelitian ini dengan milik penulis dari sisi fokus penelitian dan unsur teori Mobilisasi Sumber daya dan Gerakan Sosial, namun terdapat perbedaan pada unsur subjek penelitian yang dimuat yaitu Greenpeace Indonesia sebagai organisasi kampanye lingkungan. Melalui penelitian ketiga tersebut, peneliti merasa terbantu dengan hasil penelitian dan kerangka berpikir sehingga dapat memperkaya pandangan peneliti mengenai gerakan sosial pada isu lingkungan.

Selanjutnya pada penelitian kelima dilakukan oleh Ruhiat, F. (2019) dalam *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* Vol. 8 no.1., Mei 2019 dengan judul *(Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia))*. Pada penelitian tersebut, disimpulkan juga bahwa ditemukannya Strategi Greenpeace Indonesia dalam menangani Polusi Udara di Jakarta yaitu Greenpeace Indonesia telah menjalankan strategi dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta yang cenderung menggunakan strategi *undertaking research, dan campaigning & organizing public protest* (Ruhiat, 2019: 22). Diketahui juga bahwa urgensi gerakan yang dilakukan oleh Gemuruh tersebut dilatar belakangi oleh semakin memburuknya keadaan udara di Jakarta sehingga berpotensi tinggi dalam membahayakan kesehatan warga Jakarta. Adapun kesamaan yang dibahas pada penelitian ini dengan milik penulis dari sisi

objek penelitian yaitu Greenpeace Indonesia. Sementara itu terdapat perbedaan pada objek penelitian yang dilakukan yaitu peneliti melakukan penelitian pada program Global Climate Strike 2023 oleh Greenpeace Indonesia bukan mengenai polusi udara di Jakarta. Melalui penelitian ketiga tersebut, peneliti merasa terbantu dengan hasil penelitian dan kerangka berpikir sehingga dapat memperkaya pandangan peneliti mengenai strategi kampanye Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan lingkungan hidup yang ideal bagi seluruh makhluk hidup.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Masalah	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Gerakan Mahasiswa Pemuda Tastura (Tatas Tuha Trasna) dalam Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi di Lombok Tengah	Bagaimana GEMA Tastura mengatasi isu program pupuk bersubsidi dari pemerintah yang tidak merata untuk petani akibat kelangkaan pupuk bersubsidi dan manipulasi harga pedagang	Teori Gerakan Sosial	Metode Kualitatif	Dengan melakukan pergerakan dua arah, GEMA Testura dinilai berhasil sebagai sebuah gerakan sosial baru dalam mengatasi program pupuk bersubsidi di Lombok Tengah dengan cara pemberdayaan pada petani.

2	<p>Strategi Mobilisasi</p> <p>Sumber daya Gerakan Sekolah Menulis Buku Sebagai Gerakan Sosial Baru(Studi Kasus Pada Organisasi Gerakan Menulis Buku Indonesia</p>	<p>Bagaimana strategi</p> <p>Gerakan Menulis Buku Indonesia memobilisasi sumber daya dalam rendahnya budaya literasi pelajar di Kartasura? Apa hambatan yang ada pada saat gerakan sosial dilakukan?</p>	<p>Teori Gerakan</p> <p>Sosial Baru dan Mobilisasi Sumber daya yang dikembangkan oleh McCharly dan Zald</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Pada penelitian</p> <p>Ini ditemukan beberapa faktor penghambat dalam masalah rendahnya budaya literasi di Surakarta seperti segi internal(pengambilan waktu, kondisi tim yang upgrading, manajerial waktu yang buruk, dan faktor eksternal seperti adanya resistensi beberapa pihak masyarakat yang belum menerima Gerakan Menulis Buku Indonesia dengan baik. Sebagai gerakan sosial baru, GSMB memiliki strategi memobilisasi sumber daya moral,</p>
---	---	--	---	--------------------------	--

					kultural, organisasi-sosial, dan material yang positif.
3	Mobilisasi Sumber daya dalam Aksi Kamisan	Bagaimana strategi mobilisasi aktor Gerakan Kamisan selama 12 tahun dalam rptes atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia?	Teori Mobilisasi Sumber daya dengan fokus Jaringan Sosial	Metode Kualitatif	Ditemukannya strategi mobilisasi tersebut seperti pemanfaatan <i>public figure</i> strategi penggunaan media sosial, strategi pelibatan anak muda, strategi perkembangan isu.
4	Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan	Bagaimana peran organisasi Gemuruh dalam mengatasi kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan, serta bagaimana strategi Gemuruh sebagai gerakan sosial dalam memobilisasi sumber daya.	Teori Mobilisasi Sumber daya	Metode Kualitatif	Strategi Gemuruh memobilisasi para aktor sesuai dengan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan gerakan sosial seperti mengajak partisipan melakukan promosi pada media sosial, pembuatan akun media sosial, membentuk

					jaringan pada pengunjung yang ada di potensi wilayah desa, dan kepada sekolah-sekolah di kecamatan Muncar.
5	Strategi NGO Lingkungan  Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)	Bagaimana Strategi Greenpeace Indonesia dalam menanggulangi polusi udara di Jakarta?	Konsep Strategi NGO Lingkungan oleh John McCormick	Metode Kualitatif	Greenpeace Indonesia telah menjalankan strategi dalam Penanggulangan polusi udara di Jakarta yang cenderung menggunakan strategi <i>undertaking research</i> , dan <i>campaigning &amp; organizing public protest</i> .

Berdasarkan pemetaan hasil penelitian terdahulu dan konteks pada penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai upaya Greenpeace Indonesia dalam Mobilisasi Sumber daya pada aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Greenpeace Indonesia dalam melakukan mobilisasi sumber daya yang ada di sekelilingnya pada aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Hal ini diketahui juga bahwa menjadi momentum krusial karena aksi Global Climate Strike merupakan agenda tahunan. Artinya bahwa terdapat perubahan dinamis pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan konsep Gerakan Sosial yang dikembangkan oleh Della Porta dan Diani pada tahun 2006 dan *Resource Mobilization Theory* (Teori Mobilisasi Sumber daya) yang dikembangkan oleh Edwards dan McCarthy dalam Sukmana tahun 2016. Unsur yang terkandung pada penelitian terdahulu merupakan sebuah referensi bagi peneliti, sehingga pada lima penelitian terdahulu memiliki unsur kesamaan, perbedaan, hingga manfaat untuk memperkaya pembahasan pada penelitian ini. Gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya pada penelitian terdahulu didominasi pada kategori gerakan sosial partisipatif dan akar rumput, sementara itu pada penelitian ini Greenpeace Indonesia yang dinilai sebagai organisasi gerakan profesional tepatnya Social Movement Organization (SMO). Sehingga dengan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini cukup jelas juga pada sisi teknis data yang mencakup informan, usia, dan hasil pembahasan relevan mengenai kondisi sumber daya pada Global Climate Strike 2023 di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Organisasi Gerakan Sosial

Pada konteks gerakan sosial, secara sederhana Organisasi Gerakan Sosial merupakan sebuah organisasi dengan sifat kompleks dan formal yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau gerakan balasan serta mengupayakan untuk mengimplementasikan tujuan yang direncanakan (kontra gerakan sosial) (McCarthy dan Zald dalam Sukmana, 2016: 175). Organisasi Gerakan Sosial memiliki perbedaan dari partai politik maupun kelompok kepentingan lainnya karena sumber utama kekuasaan dan legitimasi dari organisasi gerakan sosial berupa kapasitas mobilisasi protes sebagai lawan dari suara dominan dan pengaruh masing-masing individu (Rucht dalam Porta dan Diani, 2006:140). Gerakan sosial sendiri merupakan sebuah upaya kolektif yang memiliki tujuan untuk mengusahakan sebuah kepentingan bersama atau gerakan melalui sebuah tindakan kolektif lepas dari kapasitas lembaga- lembaga yang mapan (Putra, 2006: 3). Sebagai landasan dasar, identitas sosial aktor dalam periode tertentu berpotensi tinggi untuk mengarahkan perilaku yang akan dimunculkan oleh aktor gerakan sosial (Sukmana, 2016). Sementara itu identitas kolektif merupakan bagian dari identitas personal yang membagi sebuah moral atau perasaan unsur kami (*we- ness*) dengan organisasi kolektif (Snow dalam Sukmana, 2016: 165). Meskipun bagian dari identitas personal, identitas kolektif dapat dihubungkan dengan berbagai macam konsep seperti ideologi dan motivasi (Snow dalam Sukmana, 2016: 166). Berdasarkan isu dan dilema yang ada pada masyarakat, terdapat juga beberapa jenis organisasi gerakan sosial yang dikategorikan sebagai berikut:

## 1. Organisasi Gerakan Partisipatif

### a. Organisasi Protes Massa

Model ini menggabungkan perhatian pada demokrasi partisipatif dengan tingkat formal tertentu dari struktur organisasi (Porta, 2006: 147). Dalam identifikasi organisasi model protes massa ini, hal ini cenderung ditemukan pada peran oligarki yang dapat ditemukan dalam segala jenis organisasi dan struktur institusi, selain itu juga dapat ditemukan dengan masalah yang terkait seperti model demokrasi organisasi partisipatif yang dicerai (Porta, 2006: 147).

### b. Organisasi Akar Rumput

Berbeda dengan model protes massa, model akar rumput menggabungkan orientasi partisipatif yang kuat dengan tingkat penataan formal yang rendah. Keberadaan organisasi semacam ini tergantung pada kesediaan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Partisipasi semacam itu dapat didorong melalui kombinasi insentif ideologis dan solidaristik yang berbeda. Hal ini terkait dengan lokalitas (Porta, 2006: 149). Organisasi akar rumput sangat bergantung pada partisipasi sukarela anggota mereka, kapasitas organisasi akar rumput untuk bertindak dengan kontinuitas dari waktu ke waktu jelas terbatas. Banyak dari mereka benar-benar melihat pergantian fase aktivisme dan latensi, sebanding dengan yang diidentifikasi oleh Melucci dan rekan-rekannya (Melucci dalam Porta, 2006) untuk gerakan sosial secara keseluruhan. Mereka beroperasi sebagai "struktur intermiten" yaitu, "organisasi atau unit organisasi yang dikerahkan dan kemudian "dilipat" sampai periode aktivitas mereka tiba

lagi" (Etzioni dalam Porta, 2006: 149).

## 2. Organisasi Gerakan Profesional

Adapun karakteristik yang identik dengan organisasi gerakan sosial profesional, di antaranya seperti kepemimpinan organisasi yang mencurahkan waktu penuh untuk sebuah gerakan sosial yang di mana organisasi tersebut juga merasa mewakili aktor tertindas pada sebuah gerakan sosial, serta sebagian besar sumber dayanya berasal dari luar organisasi tersebut; (2) memiliki keanggotaan yang cukup kecil atau tidak permanen; (3) terdapat upaya untuk menunjukkan citra 'berbicara untuk konstituen'; (4) memiliki upaya untuk mempengaruhi kebijakan terhadap konstituen yang sama; (5) Posisi staf profesional sangat berperan penting dalam isu yang diambil organisasi atas masalah terkait (McCarthy dan Zald dalam Porta, 2006: 145). Jenis organisasi ini pun menampilkan banyak sifat organisasi profesional yang di mana partisipasi kerap didorong untuk menjadi sukarelawan untuk berkontribusi dalam proyek tertentu (Kolb dalam Porta, 2006: 145). Agenda pada organisasi gerakan sosial ini dapat mempromosikan tantangan dan pembangkangan radikal, dan terlibat dalam berbagai bentuk aktivisme perwakilan atas nama keanggotaan pasif yang membayar biaya (Diani dan Donati dalam Porta, 2006: 145). Merujuk pada kedua tipe organisasi gerakan sosial menurut Della Porta dan Diani tahun 2006 dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama *internship* di Greenpeace Indonesia pada bulan Oktober 2022 hingga Maret 2023, Greenpeace Indonesia identik dengan organisasi gerakan profesional. Hal ini berkaitan dengan konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu

organisasi gerakan sosial profesional.

### 1.5.2 Mobilisasi Sumber Daya

Pada konteks gerakan sosial, mobilisasi sumber daya atau *Resource Mobilization Theory (RMT)* memiliki sebuah pengertian utama yaitu sebuah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial (Fireman dan Gamson dalam Sukmana, 172: 2016). Basis rasionalitas dalam gerakan sosial tersebut mencakup beberapa konsep *reward*(imbalan) dan *cost*(biaya) yang mencakup seperti waktu, uang, keamanan personal, dan kehilangan pekerjaan (Sukmana, 173: 2016). Artinya bahwa terdapat beberapa pendekatan mobilisasi sumber daya yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi gerakan sosial agar proses dalam melakukan konsentrasi kontribusi berjalan ideal dan tujuan gerakan sosial tercapai. Hal ini dapat ditemui dalam bentuk persyaratan fisik maupun lingkungan yang di mana hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan dan perilaku sebuah gerakan (Pichardo dalam Sukmana, 2016: 172). Konsep mobilisasi sumber daya merupakan unsur krusial dalam menekankan beberapa faktor seperti faktor struktural, ketersediaan sumber daya untuk individu dan kolektivitas yang terjalin di dalamnya serta menekankan unsur rasional mengenai partisipasi pada gerakan sosial (Klandermans dalam Sukmana, 2016: 172). Melalui elemen tersebut, dapat diartikan bahwa masing-masing elemen mobilisasi sumber daya pada gerakan sosial berkaitan satu sama lain agar menciptakan mobilisasi yang ideal. Menurut Pichardo dalam Sukmana (2016: 174) jenis pendekatan yang ada pada konsep mobilisasi sumber daya ini mencakup beberapa hal di antaranya seperti *The Political interactive model* yang dikembangkan oleh Charles Tilly, Gamson, Oberschall, dan McAdam yang

menjelaskan bahwa model mobilisasi sumber daya dinilai berhasil ditandai dengan adanya hubungan horizontal dari aktor gerakan sosial dengan kelompok tertindas pada agenda gerakan sosialnya seperti partai politik pada sebuah negara.

Sementara itu model selanjutnya adalah *The Organizational-entrepreneurial model* yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald dengan penekanan bahwa indikator keberhasilan gerakan sosial ditandai dengan terdapat dinamika organisasional seperti kepemimpinan yang baik, dan pengelolaan sumber daya (Pichardo dalam Sukmana, 2016: 174). Mengenai sumber daya yang dimaksud, setidaknya terdapat 5(lima) bentuk sumber daya pada konteks gerakan sosial menurut Edwards dan McCarthy dalam Sukmana (2016: 185) yaitu:

1. Sumber daya moral, dalam hal ini secara sederhana dinilai bahwa meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan dari tokoh masyarakat yang dilegitimasi dengan cara teoritis yaitu mendapatkan banyak perhatian. Sumber daya ini cenderung berasal dari luar aktor gerakan sosial. Kategori dari sumber daya ini mampu dilihat melalui upaya gerakan sosial dalam mengumpulkan publikasi dari individu hingga organisasi yang mendukung tujuan aksi gerakan sosial.
2. Sumber daya kultural, dalam hal ini meliputi berbagai pengetahuan, produk budaya, atau pengalaman yang telah dikenal secara lebih luas walau tidak bersifat umum seperti merancang konsep protes akan sebuah isu, mengadakan konferensi pers, mengatur rapat atau pertemuan, membentuk sebuah organisasi. Hal ini dinilai penting karena kompetensi atau pengetahuan khusus mampu menjadi nilai bagi

sebuah gerakan sosial. Kategori dalam sumber daya ini meliputi produk kultural seperti musik, literatur, film, dan video.

3. Sumber daya organisasi sosial, dalam hal ini meliputi pembentukan organisasi sosial yang disengaja atau organisasi sosial sepadan. Organisasi sosial yang disengaja merupakan organisasi yang dibentuk dengan motif khusus agar gerakan sosial dapat akses lebih lanjut, sedangkan organisasi sepadan dibentuk tidak untuk tujuan gerakan sosial namun aktor pada gerakan sangat memungkinkan mendapatkan akses dari organisasi ini. Bentuk pada sumber daya ini meliputi juga infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi yang dapat dikendalikan lebih jauh untuk mencapai tujuan gerakan sosial.
4. Sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya manusia memiliki sifat *tangible* atau nyata yang meliputi tenaga kerja, pengalaman, keterampilan, dan keahlian seperti kepemimpinan. Organisasi gerakan sosial dapat mengumpulkan dan menyebarkan anggotanya dengan lebih efektif dibanding dengan sumber daya organisasi sosial. Tetapi, kapasitas partisipasi tersebut dibatasi dari faktor ruang, ekonomi, relasi sosial, kewajiban, dan komitmen moral.
5. Sumber daya material, dalam hal ini kategori sumber daya material mencakup beberapa hal nyata seperti modal fisik dan finansial seperti moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan. Hal ini bersifat eksklusif karena kasus uang lebih fungsional daripada karakteristik sumber daya lainnya.

Adapun berbagai mekanisme yang digunakan dalam mengakses sumber daya di

atas yang mencakup beberapa hal menurut Edwards dan McCarthy dalam Sukmana (2016:188) yaitu:

1. Agregasi atau pengumpulan, hal ini merupakan sebuah cara untuk melakukan konversi yang sebelumnya sumber daya menyebar pada tiap individu, lalu dikonversi menjadi sistem kolektif oleh aktor gerakan
2. Produksi diri, pada mekanisme ini memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial menciptakan sumber daya atau menambah nilai pada sumber daya yang telah dikumpulkan. kategori yang mampu dilihat pada mekanisme ini beberapa di antaranya seperti membentuk koalisi, membangun jaringan, mendirikan organisasi gerakan sosial, dan lain lain.
3. Kooptasi atau pengambilan, hal ini memiliki acuan yaitu penggunaan sumber daya yang telah dikumpulkan secara transparan dan sesuai dengan izin kelompok.
4. Perlindungan, hal ini memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial mendapatkan penganugerahan berupa sumber daya dari individu atau organisasi. Bentuk umum yang dapat ditemui pada hal ini seperti penyediaan sumber daya manusia untuk beberapa waktu tertentu, donasi dari pihak swasta, hibah yayasan, dan lain lain.

Berdasarkan jenis pendekatan mobilisasi sumber daya di atas, penelitian ini menggunakan model Organizational Entrepreneurship yang di mana indikator keberhasilan mampu dilihat melalui adanya dinamika organisasional seperti kepemimpinan yang baik, dan pengelolaan sumber daya pada Greenpeace Indonesia. Adapun 5 komponen sumber daya dan akses dalam mengumpulkan hingga menggunakannya yang diterapkan pada penelitian ini sesuai dengan

konsep Edwards dan McCarthy dalam Sukmana (2016: 185) yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya organisasi sosial, sumber daya manusia, dan sumber daya material pada Greenpeace Indonesia.

